



**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA



DESA DAN PERTANIAN DI WILAYAH PENYANGGA IBUKOTA

**STUDI KASUS DESA KURIPAN, KECAMATAN CISEENG,
KABUPATEN BOGOR**

Tim Penulis :

Meisanti
Lusi Andriyani
Oktaviana Purnamasari
Sularno
Izzatusholekha

Hasanah
Jamiati KN
Tria Patrianti
Lilik Sumarni

**BANTUAN PENDANAAN PROGRAM PENELITIAN KEBIJAKAN MERDEKA
BELAJAR KAMPUS MERDEKA DAN PENGABDIAN MASYARAKAT BERBASIS
HASI PENELITIAN DAN PURWARUPA PTS**

**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
TAHUN 2021**



**DESA DAN PERTANIAN DI WILAYAH PENYANGGA IBUKOTA
STUDI KASUS DESA KURIPAN, KECAMATAN CISEENG,
KABUPATEN BOGOR**

**Meisanti
Lusi Andriyani
Sularno
Oktaviana Purnamasari
Izzatusholekhah
Hasanah
Jamiati KN
Tria Patrianti
Lilik Sumarni**



**BANTUAN PENDANAAN PROGRAM PENELITIAN KEBIJAKAN
MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA DAN PENGABDIAN
MASYARAKAT BERBASIS HASI PENELITIAN DAN PURWARUPA PTS**

**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN
TEKNOLOGI KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET,
DAN TEKNOLOGI
TAHUN 2021**

**DESA DAN PERTANIAN DI WILAYAH PENYANGGA IBUKOTA
STUDI KASUS DESA KURIPAN, KECAMATAN CISEENG,
KABUPATEN BOGOR**

i-v, 54 hlm

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang memproduksi/memfotocopi seluruh atau sebagian isi buku ini dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari Penerbit. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dianggap melanggar Undang-undang Hak Cipta Republik Indonesia.

Tim Penulis:

Meisanti *Lusi Andriyani *Sularno *Oktaviana Purnamasari
Izzatusholekhah *Hasanah *Jamiati KN *Tria Patrianti *Lilik
Sumarni

Tim Data Lapangan:

Jodhi Hermawansyah*Dezan Ziandhani*M. Sultan Arnadien
Camille Nazhly*Ivan Alamsyah*Dewi Nurlaela Sari
Alfianta Cesario Rizky Maulana*Muhammad Hilmi Rozaldi
Azrial Rizki*Mariatul Qibtiah*Sururi Afief *Anisa Rahmah
*Aisah Miftakhul Janah *Aprilia Zirli Kurniaji
*Mutia Anggraini *Tarti*Tini Herawati

Editor:

Lusi Andriyani

Desain sampul dan tata letak :

Gusti Rahmad Rizaldi

ISBN :

9786235523460

Diterbitkan oleh:

UM Jakarta Press

Anggota IKAPI (053/Banten/2021)

Jl. KH. Ahmad Dahlan, Cirendeui, Ciputat Timur - Jakarta Selatan 15419

Telp. : 021-7492862, 7401894, e-mail: umjakarta.press@gmail.com

Cetakan Pertama : Januari 2022

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah puji syukur kami haturkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat Kesehatan dan hidayahnya sehingga penulisan buku *Desa dan Pertanian di Wilayah Penyangga Ibu Kota* dapat selesai pada waktunya. Buku ini merupakan hasil dari kegiatan Pengabdian Masyarakat yang dilakukan oleh Tim PKM Universitas Muhammadiyah Jakarta di Desa Kuripan Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor tahun 2021.

Buku ini ditulis oleh tim PKM UMJ berdasarkan tinjauan sosiologi pertanian yang menggambarkan bagaimana masyarakat di Desa Kuripan yang dahulunya adalah Desa Agraris kini bergeser menjadi Desa rural-urban yang terdampak oleh berbagai problematika kota di sekitarnya. Mulai dari masalah lahan, masalah ekonomi (Bank Emok) hingga masalah sosial.

Terimakasih kami sampaikan kepada Tim Pengabdian Masyarakat UMJ kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, atas Bantuan Pendanaan Program Penelitian Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Dan Pengabdian Masyarakat Berbasis

Hasil Penelitian Dan Purwarupa Perguruan Tinggi Swasta dengan Nomor kontrak pelaksanaan kegiatan 468/PPK/Kerma/PKS/2021 atas pendanaan dan fasilitasnya. Kepada UMJ, LPPM, Fakultas, Prodi, Dosen, Mahasiswa dan Tenaga Kependidikan atas fasilitasi dan pelaksanaannya. Teristimewa kepada Kepala Desa Kuripan, Ibu Siti Aswat Narulita beserta jajarannya dan masyarakat Desa Kuripan. Secara khusus trimakasih kepada tim penulis yang telah memberikan kontribusi pemikiran dalam penyusunan buku ini semoga Allah SWT membalasnya dengan pahala. Akhirnya adalah harapan, semoga buku ini membawa manfaat bagi pembaca sekalian.

Billahifiisabililhaq Fastabiqul Khairat,
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Ketua Tim Penulis,

Dr. Meisanti, S.P.,M.P.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI	v
BAB I KURIPAN, DESA RURAL URBAN PENYANGGA IBU KOTA	
.....	1
BAB II MASYARAKAT TANPA LAHAN.....	15
2.1. Hutan Bambu Menjadi Perumahan	15
2.2. Problematika Lahan.....	22
BAB III PETANI SINGKONG DAN TENKULAK.....	28
BAB IV BANK EMOK.....	36
BAB V DAMPAK PANDEMI COVID-19.....	40
DAFTAR PUSTAKA.....	50

BAB I
KURIPAN, DESA RURAL URBAN
PENYANGGA IBU KOTA

Daerah Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi adalah penyangga utama Jakarta. Sebagai kota Megapolitan terbesar di Indonesia, Daerah Khusus Ibu Kota Republik Indonesia ini senantiasa beraktivitas selama 24 jam. Ekonomi terus berjalan seiring detak waktu yang bergulir maju. Disinilah daerah-daerah penyangga Ibu Kota memainkan peranan penting, sebagai daerah produksi yang menyuplai kebutuhan sang Ibu baik tenaga kerja, pasokan bahan makanan, sumber bahan baku bahkan menyediakan ruang-ruang wilayahnya sebagai jalan penghubung, pabrik, perumahan, bandara, pelabuhan dan fasilitas lainnya.

Hubungan yang terjalin antara Jakarta dan daerah penyangganya dalam ekonomi wilayah dikategorikan sebagai nodal region, yaitu secara fungsional memiliki saling ketergantungan antara Jakarta sebagai pusat (inti) dengan Bodetabek sebagai daerah belakangnya (*interland*). Tingkat ketergantungan yang erat terlihat jelas dari arus penduduk,

faktor produksi barang dan jasa maupun transportasi dan komunikasi. Nodal region ini menjadi pusat kegiatan-kegiatan ekonomi. Sebagai contoh, wilayah interland menyediakan bahan mentah (*raw material*) yang diproduksi menjadi barang-barang jadi oleh pusat dan dipasarkan kembali ke wilayah *interlandnya*.

Bodetabek sebagai daerah penyangga Ibu Kota ikut bergerak maju seiring makin modernnya Jakarta. Daya tarik Jakarta sebagai pusat ekonomi bagaikan gula yang menarik semut-semut pekerja datang berbondong-bondong menjemput gula tersebut. Jakarta menjadi padat, tak lagi menyisakan ruang hidup bagi pekerja-pekerjanya, dan dampaknya mereka yang bekerja di Jakarta harus tinggal di daerah sekitar Jakarta. Maka daerah-daerah penyanggapun berkembang secara pesat. Perumahan di bangun masif di Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi untuk tempat tinggal mereka yang bekerja di Jakarta. Untuk memudahkan mobilitas penduduk dan juga arus keluar masuk barang dari daerah penyangga dibangunlah jalan-jalan tol yang megah. KRL disediakan sebagai sarana transportasi bebas macet yang sangat murah dan menjangkau jauh hingga ke pelosok daerah-daerah penyangga. Akibatnya, dalam hitungan jari, perumahan menjamur di area sekitar stasiun. Lahan-lahan pertanian berupa sawah-sawah yang subur, kebun-

kebun sayur dan kebun buah pelan-pelan menghilang dan terganti oleh perumahan.

Pesatnya pembangunan membuat desa-desa banyak yang berubah menjadi desa kota atau rural-urban (rurban). Dalam konteks Indonesia, terdapat dua definisi tentang kota, yaitu pertama kota administratif dimana suatu wilayah (kota) memiliki status perkotaan resmi (kota otonom) dan kedua, kota secara fungsional, dimana sebuah desa dapat didefinisikan sebagai kota sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah ditentukan (Kompas, 2021). Selanjutnya, dalam kuruan waktu 10 tahun (2010-2020) provinsi di Indonesia yang paling banyak mengalami penambahan desa perkotaan paling banyak adalah Jawa Tengah (2.611), disusul oleh Jawa Timur (2.425) dan Jawa Barat (1.635). Penambahan yang terjadi juga diikuti oleh pengurangan jumlah perdesaan yang relatif sama jumlahnya. Data ini menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah di Tanah Jawa sudah berubah menjadi wilayah perkotaan. Dengan melihat kondisinya maka desa-desa di pinggiran kota Jakarta yang menjadi penyangga ibu Kota dikategorikan sebagai desa kota bukan secara administrasi tetapi lebih secara fungsional, termasuk Desa Kuripan.

Menurut Van de Wal dalam Kompas (2015), terdapat enam indikator yang menandakan secara spesifik tentang desa-

kota yaitu konektivitas, ekonomi rural urban, pengaturan sumber daya, pertanian, saucana dan ketahanan sosial. Desa Kuripan yang ada di Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor dapat dikategorikan ke dalam desa kota (rurban) berdasarkan keenam indikator Van de wal tersebut.

1. Konektivitas.

Dari aspek konektivitas, Desa Kuripan berada dalam radius kurang dari 60 km dengan kota-kota besar seperti Kota Bogor, Kota Depok, Kota Tangerang Selatan dan Kota Jakarta. Mobilitas tinggi ke kota-kota tersebut yang terhubung oleh stasiun KRL yang berada di Serpong dengan masa tempuh 30 menit dari Desa Kuripan. Rute operasi KRL menghubungkan Jabodetabek dengan cepat dan tanpa kemacetan. Arus informasi ke desa sangat cepat bukan saja melalui TV atau radio namun terutama melalui media sosial seperti Youtube, facebook, tiktok dan lainnya oleh adanya akses internet yang telah sampai ke Desa. Hampir semua rumahtangga di desa telah memiliki handphone sebagai sarana komunikasi dan media informasi.

2. Ekonomi rural-urban.

Dari kriteria ini, ekonomi rural urban telah mewarnai Desa Kuripan yang menyediakan sumber tenaga kerja ditandai

oleh terjadinya migrasi harian penduduk desa ke kota. Setiap hari sepertiga pencari nafkah yang tinggal di Desa Kuripan berangkat kerja ke kota-kota terdekat. Kebanyakan berangkat dipagi hari dan pulang sore/ malam hari. Sebagian lagi menjadi migrasi yang menetap sementara di kota pada hari kerja dan kembali ke desa di akhir pekan. Geliat ekonomi terdekat berpusat di Parung terutama di pasar Parung sebagai pasar besar terdekat. Pusat industri dan pabrik juga berada di Parung dan Serpong. Semuanya dalam radius 25 km. Beragam sekolah dari SD sampai SMA berada dalam radius 5 km, Sebagian berada di dalam desa, sedangkan beragam perguruan tinggi besar seperti IPB, UIN, UMJ dan lainnya berada dalam radius 25 km. Beberapa Rumah sakit besar terdekat seperti RSIA Citra Insani, Klinik Medika, Brawijaya Hospital berada pada radius kurang dari 10 Km sementara sarana Kesehatan yang ada di desa adalah Puskesmas Pembantu.

3. Pengaturan sumber daya.

Desa Kuripan bergantung pada daerah sekitarnya untuk beberapa sumberdaya. Untuk kebutuhan sehari-hari di desa tetangga telah tersedia supermarket seperti indomaret dan alfamart yang menyediakan kebutuhan warga. Sementara di Desa Kuripan sendiri tidak terdapat supermarket semacam itu

disebabkan pemerintah desa tidak memberikan ijin usaha bagi supermarket untuk menghidupkan warung kelontong milik warga yang secara kapital tidak mampu bersaing dengan supermarket.

Kebutuhan dasar seperti air bersih diperoleh dari sumur gali yang diusahakan oleh warga per rumah tangga. Beberapa yang mampu menggunakan listrik dan menampung airnya di toren sedangkan yang tidak mampu menimba dari sumur gali secara manual. Adapun kebutuhan air minim, warga Desa Kuripan membeli galon isi ulang di Bumdes atau dari luar desa. Dari tiga dusun yang ada di Desa Kuripan, sumber air pertanian di Dusun Cihowe berasal dari mata air dusun yang disebut air mancur oleh warga. Air ini digunakan warga untuk kegiatan usahatani, baik tanaman singkong, tanaman Anggrek dan juga budidaya ikan air tawar. Di dusun Kuripan sumber air berasal dari sungai Cisadane yang dialirkan ke lahan-lahan pertanian warga. Sedangkan dusun Gunung Calincing, tidak terdapat sumber air sehingga kegiatan pertanian kurang yang ada adalah usaha peternakan.

Sungai Cisadane yang mengalir di dusun Kuripan sebenarnya merupakan sumberdaya alam yang sangat potensial untuk mendukung ekonomi desa namun belum termanfaatkan dengan baik. Dahulunya sungai ini menjadi sarana untuk

mengirim hasil produksi bambu ke luar desa sebelum akses jalan ke desa sebaik yang ada saat ini. Bambu bahkan menjadi sumber daya pendukung pembangunan desa disamping bahan-bahan bangunan yang kini mudah diperoleh di toko-toko bahan bangunan di sekitar desa. Untuk sumberdaya tanah, pemanfaatannya telah banyak yang beralih dari pertanian menjadi perumahan sebagaimana ciri desa rurban lainnya.

4. Pertanian.

Populasi diisi oleh sebagian besar rumah tangga yang tinggal di daerah kombinasi antara pertanian dan perkotaan. Setidaknya sebanyak 25 persen populasi bergantung pada pertanian. Di Desa Kuripan sekalipun mata pencaharian penduduk 60% lebih telah bergeser ke luar sektor pertanian namun kehidupan pertanian masih terasa. Hanya 17 persen yang masih bekerja disektor pertanian on farm sebagai sumber nafkah utama. Tetapi masih ada penduduk yang sekalipun telah punya pekerjaan utama, masih mempertahankan kegiatan pertanian baik on farm maupun off farm sebagai pekerjaan sampingan. Dengan demikian menurut informasi dari pemerintah desa, masih ada 25% warga yang memperoleh pendapatan dari sector pertanian. Meski demikian, petani yang menggantungkan hidupnya dengan bekerja di sector pertanian

tergolong ke dalam petani kecil (*peasant*). Dalam beberapa literatur, gambaran tentang peasant seringkali dikaitkan dengan adanya hubungan khusus antara petani dengan tanah garapannya. Terdapat hubungan intim dan sikap hormat kepada tanah. Redfield (1985) menunjukkan bagaimana petani mengendalikan secara efektif sebidang tanah yang dia sendiri sudah lama terikat oleh ikatan-ikatan tradisi dan perasaan. Namun di Desa Kuripan, petani yang merupakan peasant ini mengolah lahannya untuk keuntungan semata. Sikap intim dan hormat kepada tanah telah tereduksi oleh budaya materialistik sebagai ciri kehidupan perkotaan yang bergeser ke Desa rurban. Di Desa Kuripan, petani tidak segan melepas lahannya untuk memperoleh keuntungan secara ekonomi.

5. Saucana.

Lanskap dikembangkan dengan identitas khusus dan kuat berdasarkan periode pertanian yang dilengkapi dengan koridor perkotaan (Saucana). Desa Kuripan dalam lanskapnya terdiri atas daerah pemukiman penduduk local yang dibangun di sepanjang jalan utama desa. Beberapa wilayah desa telah dibangun 7 (tujuh) perumahan dengan arsitektur modern dan terlihat megah dibandingkan rumah-rumah tinggal penduduk yang sederhana. Beberapa perumahan telah ramai dihuni oleh

warga pendatang. Akses jalan ke perumahan dibuka, sayangnya perumahan yang ada dibangun di dekat sungai Cisadane yang berupa dataran rendah.

Adaptasi sosial masyarakat dengan perubahan yang terjadi cukup tinggi dimana setelah tanah-tanah pertanian beralih kepemilikan, petani menjadi buruh disamping tetap bercocok tanam. Meski demikian, terdapat kekhawatiran masuknya banyak penduduk dari luar sebagai warga baru penghuni perumahan akan mempengaruhi interaksi sosial masyarakat dan juga membawa perubahan struktur sosial yang ada.

6. Ketahanan sosial.

Ketahanan sosial, mudah beradaptasi, dan ikatan sosial internal yang kuat adalah akar dari desa-kota. Penduduk desa Kuripan termasuk mudah beradaptasi dengan perubahan yang berlangsung cepat di desanya. Dahulunya Kuripan merupakan desa pertanian yang sebagian besar penduduknya hidup dengan bertani. Hingga tahun 2011 pertanian padi sawah masih dilakukan di Desa Kuripan. Meskipun sejak tahun 2000an, pertanian padi sawah mulai berkurang seiring hilangnya sumber air sawah. Hilangnya sumber nafkah dengan cepat membuat penduduk lekas beradaptasi. Mereka yang berusia

muda mencari pekerjaan di luar desa untuk membantu ekonomi keluarga. Pada tahun 2000, propinsi Banten terbentuk dan pembangunan berlangsung sangat cepat. Dibukanya pabrik-pabrik di sekitar BSD Tangerang Selatan dan di Bogor (Parung dan Gunung Sindur) serta perkembangan toko-toko di pasar Parung menyerap tenaga kerja dari daerah sekitarnya termasuk desa Kuripan.

Gambar 1. Gambar Letak Desa Kuripan.



Penduduk desa Kuripan yang berusia muda meninggalkan lahannya dan memilih bekerja di pabrik. Mencari uang jauh lebih mudah dengan bekerja sebagai buruh dibanding harus bertani yang dalam prosesnya penuh resiko, apakah berhasil atau gagal panen. Pekerjaan bertani memerlukan waktu yang lama untuk menuai hasilnya, mulai dari persiapan lahan, menanam, memelihara hingga panen memerlukan waktu berbulan-bulan. Karena kebanyakan melakukan pertanian monokultur maka seringkali petani hanya memperoleh pendapatan sekali dalam beberapa bulan, yaitu hanya saat panen. Sedangkan diantara waktu tersebut petani harus mengeluarkan biaya terus menerus untuk usahatannya maupun untuk kehidupan rumah tangganya.

Dari kondisi yang ada terdapat factor pendorong dan penarik terjadinya migrasi penduduk usia muda ke kota. Bertambahnya jumlah angkatan kerja berusia muda di Desa Kuripan tidak dapat terserap oleh terbatasnya lahan dan daya dukung pertanian (lahan yang dijual, beralih fungsi dan sumber air yang hilang) adalah factor pendorong utama. Sedangkan sumber pekerjaan lain yang terbuka di kota-kota sekitar desa dan memungkinkan penduduk desa untuk terlibat didalamnya adalah factor yang menarik mereka yang berusia muda

mengambil peluang tersebut. Bekerja di kota dan mengirim uang ke desa menjadi adaptasi penduduk desa. Hal ini sejalan dengan Millikan dan Hapgood (1972) bahwa tenaga kerja yang tidak terserap di pekerjaan pertanian pedesaan akan dipakai pada kegiatan industri perkotaan yang akan meningkatkan daya beli di pedesaan sehingga pada akhirnya meningkatkan taraf hidup masyarakat desa.

Pemuda-pemudi desa Kuripan yang paling tinggi berijazah SMA atau sederajat tidak mengincar pekerjaan bergaji besar yang memerlukan kualifikasi pendidikan tinggi atau sarjana. Bagi mereka, menjadi buruh atau karyawan pada pabrik-pabrik di wilayah yang terjangkau dari desa Kuripan seperti di Kota Tangerang Selatan ataupun Bogor, sudah cukup. Mereka bisa memperoleh kepastian pendapatan tetap bulanan dengan beradaptasi, belajar pada lingkungan kerjanya. Sejak itu beralihlah para pemuda desa Kuripan meninggalkan pertanian dan bekerja di luar. Sebagian tinggal di luar desa dan hanya pulang di akhir minggu atau sesekali jika keadaan memungkinkan. Sebagian lagi tetap menetap di desa dan pulang pergi kerja ke kota memanfaatkan KRL di Serpong sebagai stasiun terdekat menuju tempat kerja. Jarak tempuh dari Desa Kuripan ke stasiun KRL Serpong sekitar 30 menit menggunakan sepeda motor.

Data jenis pekerjaan yang dilakukan penduduk desa Kuripan dapat dilihat pada Tabel 1 berikut.

**Tabel 1. Jenis Pekerjaan penduduk Desa Kuripan
Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor Jawa Barat
Tahun 2019**

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah (orang)
1	PNS Umum	9
2	PNS Guru	8
3	Guru Honor	12
4	TNI	3
5	Pensiunan, TNI/POLRI	1
6	Pensiunan PNS	6
7	Karyawan Swasta	345
8	Buruh	234
9	Tukang	36
10	Pedagang Keliling	28
11	Wiraswasta	38
12	Pedagang	47
13	Petani	100
14	Buruh Tani	59
15	Bidan	1
Total		927

Sumber: desakuripan.id (diakses Desember 2021)

Dari data diatas terlihat jenis pekerjaan utama yang dilakoni penduduk Desa Kuripan bukan lagi didominasi sektor pertanian dimana petani dan buruh tani tinggal 17 % saja, tetapi didominasi oleh karyawan swasta dan buruh dengan 63% penduduk. Meski demikian kehidupan pertanian di desa terasa kental karena penduduk yang mengandalkan sumber nafkah di luar pertanian masih ada yang bercocok tanam. Sehingga sesungguhnya 25% penduduk masih terikat dengan kegiatan usahatani.

BAB II

MASYARAKAT TANPA LAHAN

Bukan hal yang baru bagi desa-desa Penyangga Kota besar seperti ibukota Jakarta menjadi desa rurban memiliki masalah terkait lahan. Desa Kuripan termasuk desa dimana masyarakatnya telah kehilangan lahan-lahan pertaniannya. Mulai dari hutan bambu di lahan petani yang bergeser menjadi perumahan, dampak alih fungsi dan kepemilikan lahan hingga konflik pertanahan akibat jual beli tanah yang tidak jelas.

2.1. Hutan Bambu Menjadi Perumahan

Desa Kuripan adalah penghasil bambu yang terkenal. Banyak lahan milik warga adalah hutan bambu yang subur meski tanpa dibudidayakan. Luas areal hutan bambu kurang lebih 50 Ha. Bambu termasuk tanaman yang dapat tumbuh dengan cepat. Dalam 24 jam tanaman bambu dapat tumbuh 3-10 cm tergantung kondisi lahan tumbuhnya. Tinggi bambu mencapai 20 m meski ada beberapa jenis bambu yang bisa tumbuh hingga lebih 30 m.

Tanaman bambu memiliki sifat dan karakteristik yang dapat memberikan perlindungan dan stabilisasi tanah termasuk tanah lereng di pegunungan yang curam. Tanaman bambu juga menyimpan air yang banyak sehingga daerah dengan hutan bambu akan memiliki penyimpanan air tanah yang banyak. Karena itu, penting bagi Desa Kuripan untuk tetap mempertahankan hutan-hutan bambu agar desa terhindar dari krisis air. Apalagi saat ini warga desa mulai mengeluhkan air yang mulai sulit terutama di musim kemarau. Dari 7 RT terdapat 3 RT yang mengandalkan mata air yang mulai kering. Menurut Analisa penulis kemungkinan dipengaruhi oleh berkurangnya sebagian hutan-hutan bambu dan pengaruh iklim. Sejak 5 tahun terakhir hutan-hutan bambu berkurang banyak hingga 20 ha, hutan bambu tersebut berubah menjadi lahan perumahan. Kini bambu yang ada di Desa Kuripan tinggal sekitar 30 Ha.

Meski menghasilkan bambu namun masyarakat di Desa Kuripan belum melakukan pengolahan untuk meningkatkan nilai guna dan harga dari bambu. Bambu yang dijual utuh tentunya memiliki harga yang jauh lebih rendah apabila bambu tersebut telah diolah menjadi material setengah jadi atau jadi seperti kursi, sekat ruangan, lampu dan lain-lain. Masih menjadi catatan bagi pemerintah Desa untuk meningkatkan

kapasitas masyarakat mengolah bambu menjadi produk bernilai lebih, jika memungkinkan membuat industri rumah tangga berbahan dasar bambu.

Dahulunya bambu yang dihasilkan Desa Kuripan dikirim ke luar dengan dialirkan melalui sungai Cisadane yang berada di Dusun Kuripan. Caranya, batang-batang bambu tersebut diikat menjadi satu lalu dibiarkan mengalir mengikuti arus sungai Cisadane. Sungai besar dengan arus yang deras mengantar bambu-bambu tersebut ke pintu-pintu air dimana telah menunggu pembeli yang akan menerima bambu tersebut. Pengiriman ini menghilangkan biaya transportasi dan menjangkau cukup jauh hingga ke pintu air 5 sungai Cisadane di Tangerang Banten. Pesatnya pembangunan di sekitar Serpong hingga daerah bandara Soekarno Hatta meningkatkan kebutuhan akan bambu dari Desa Kuripan. Karakteristik struktural dan fisik dari batang bambu yang diproduksi di Desa Kuripan sangat baik untuk digunakan sebagai bahan konstruksi. Inilah yang menjadikan permintaan akan bambu ke Desa Kuripan cukup tinggi. Pengiriman melalui sungai ini berlangsung hingga tahun 2015.

Berjalannya waktu membuat kebutuhan ekonomi masyarakat Desa Kuripan ikut berkembang. Kehidupan sosial desa tidak lagi sederhana ketika dunia semakin global dan

dekat oleh teknologi seperti handphone dan majunya transportasi. Dari survey yang dilakukan, setiap rumah tangga di Desa Kuripan telah memiliki setidaknya satu handphone yang bermakna bahwa masyarakat desa sudah menyerupai masyarakat kota. Jalan mulus beraspal telah sampai ke desa yang diikuti pembangunan perumahan mengantar masyarakat desa agraris menuju masyarakat modern mengikuti perkembangan di kota-kota sekitarnya. Maka ketika pengembang perumahan yang berbisnis properti mulai melirik daerah-daerah pinggiran, maka satu persatu hutan bambu mulai menghilang.

Tahun 2017, perumahan pertama di Desa Kuripan mulai berdiri yaitu Kuripan Regency. Sebagai wilayah penyangga, Desa Kuripan menjadi salah satu area pengembangan perumahan yang berkembang secara masif. Dalam kurun waktu 4 tahun sejak perumahan pertama berdiri, kini telah ada 7 (tujuh) perumahan di Desa Kuripan. Enam perumahan lainnya adalah Bumi Mas Ciseeng, Samadji, Vila Aster, Grand Viona, Puri Ciseeng dan Aquila. Semua perumahan yang berdiri di Desa Kuripan tersebut dibangun dibekas lahan-lahan bambu, yang terluas adalah perumahan terbaru yaitu Aquila, luasnya hingga 5 Ha.

Meskipun produksi bambu sudah berkurang oleh hilangnya 20 Ha lahan bambu yang menjadi perumahan, produksi bambu di Desa Kuripan masih cukup banyak untuk mensuplai kebutuhan bambu di wilayah sekitar Desa. Bambu tidak lagi dialirkan melalui sungai Cisadane tetapi dikirim menggunakan mobil. Pembangunan jalan desa telah membuka akses keluar masuk desa menjadi lancar. Mobilitas penduduk dan barang yang lancar membuat Desa Kuripan layaknya sebuah Kota kecil. Menjadi desa kota (rurban) yang modern.

Sebagian besar rumah-rumah yang dibangun perusahaan property berada pada topografi yang rendah, dekat dengan sungai Cisadane. Sekalipun pemerintah desa merasa khawatir dengan lokasi perumahan yang rendah, namun pihak property meyakinkan bahwa perumahan tersebut aman dari bencana seperti banjir dan ancaman luapan sungai Cisadane.

Gambar 2. Kondisi Kehidupan Masyarakat di Desa Kuripan



Pembangunan perumahan yang masif di Desa Kuripan juga merupakan dampak dari kebijakan pemerintah pusat yaitu Program Pembangunan Satu Juta Rumah. Di satu sisi Pemerintah desa berharap pembangunan perumahan yang menyambut Program Pembangunan Sejuta Rumah tidak dilakukan di wilayah pinggiran dekat sungai Cisadane, namun jika melakukan larangan dikhawatirkan menghalangi kebijakan

dari pemerintah pusat. Penataan tata ruang di desa rurban semestinya menjadi pertimbangan bersama antara pemerintah desa, kabupaten/kota dan pusat sehingga di masa depan dapat memenuhi kebutuhan penduduk yang menempati dan memanfaatkannya secara efektif dan berkeadilan.

Menurut Adisasmita (2005), gambaran wajah tata ruang geografis untuk memenuhi kebutuhan manusia secara efektif dan efisien perlu dilakukan penataan, perencanaan dan pengendalian pemanfaatan tata ruang. Pemanfaatan dan pengelolaan tata ruang yang tidak serasi akan menimbulkan dampak negatif (merugikan masyarakat) seperti: pemanfaatan sumberdaya yang berlebihan, penebangan hutan, telah menimbulkan dan mengakibatkan banjir (luapan atau genangan air) pada daerah sekitarnya, yang terjadi pada setiap tahun, yang mengakibatkan kerugian harta dan benda yang besar jumlahnya yang harus dipikul oleh masyarakat. Dampak negatif tersebut tidak memenuhi kesejahteraan masyarakat. Tata ruang geografis yang tidak serasi harus direncanakan, ditata dan dikendalikan secara serasi sehingga dapat memberikan kesejahteraan masyarakat secara optimal dan berkelanjutan dengan menerapkan azas manfaat, azas keseimbangan dan keserasian, azas kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup, dan azas berkelanjutan. Dengan

demikian, penataan tata ruang di wilayah Desa Kuripan perlu dikendalikan sebelum menjadi masalah wilayah yang semakin kompleks di tahun-tahun mendatang. Diperlukan kolaborasi dari semua stakeholder terkait untuk secara bersama-sama mengambil kebijakan dan tindakan yang arif dalam melaksanakan pembangunan wilayah.

2.2. Problematika Lahan

Salah satu problematika desa agraris yang menjadi desa rural-urban oleh statusnya sebagai daerah penyangga Ibu Kota adalah terjadinya alih fungsi lahan. Desa Kuripan tidak saja kehilangan hutan bambu yang menjadi perumahan tetapi petani juga telah kehilangan lahan-lahan pertanian miliknya. Meskipun masih melakukan kegiatan budidaya pertanian, namun 90% lahan tempat bercocok tanam petani telah beralih kepemilikan ke perusahaan-perusahaan.

Status lahan-lahan pertanian yang telah dijual tersebut sebagian besar belum *clear*. Jika tanahnya telah bersertifikat biasanya langsung dibalik nama oleh perusahaan, namun PBB tanah tersebut belum dibalik nama sehingga ketika pembayaran pajak tiba, tanah atas nama pribadi warga jauh lebih murah dibanding atas nama perusahaan yang akan dikenakan pajak progresif. Dengan demikian jumlah pendapatan dari pajak

tanah yang seharusnya tinggi di desa, tidak mengalami perubahan. Akibatnya, pendapatan desa dari pajak tanah tidak sesuai dengan yang selayaknya diterima pemerintah.

Peralihan kepemilikan lahan awalnya terjadi di tahun 1990an dimana PT Batik Keris mulai membeli lahan warga yang memerlukan uang dalam jumlah besar. Waktu itu harga tanah masih murah hanya Rp 10.000/m². Setelah itu, setiap warga yang kesulitan ekonomi dengan mudah melepaskan lahannya kepada perusahaan yang memang sedang mencari tanah-tanah murah di daerah pinggiran Jakarta sebagai investasi. Terdapat beberapa perusahaan yang membeli lahan-lahan milik warga, namun yang paling luas membeli adalah PT Batik Keris (PT. BK) dan PT Griya Bangun Kreasi (PT GBK), keduanya menguasai hingga 100 ha lahan pertanian di desa Kuripan. PT GBK atau dikenal sebagai PT LM oleh masyarakat local mulai membeli lahan sejak tahun 2015 dan sampai tahun 2021 telah menguasai sekitar 40 ha lahan.

Mengapa petani sangat mudah menjual lahan pertanian miliknya sedangkan lahan adalah modal utama dalam bercocok tanam? Hal ini terjadi karena perusahaan-perusahaan yang membeli lahan milik petani mengizinkan petani untuk tetap bercocok tanam di lahan tersebut selama pihak perusahaan belum menggunakan atau membangun di atasnya.

Dengan demikian, petani tidak merasakan bahwa tanah tersebut bukan lagi miliknya karena masih dapat memanfaatkannya untuk bercocok tanam seperti sebelum dijual.

Petani di desa Kuripan menjual lahan didorong oleh kebutuhan sosial dan ekonomi. Kebanyakan adalah untuk kebutuhan sosial. Ketika akan menikahkan anaknya atau untuk sekedar menggelar acara syukuran seperti sunatan, mereka rela menjual lahannya untuk menggelar pesta. Terdapat rasa bangga dan puas jika dapat menggelar pesta dan hal ini membudaya dalam kehidupan masyarakat. Prestise masyarakat diukur dari bagaimana pesta yang diselenggarakan oleh keluarganya. Faktor budaya seperti ini adalah salah satu penyebab kemiskinan. Masyarakat yang dulunya bukan masyarakat miskin menjadi jatuh taraf hidupnya karena kehilangan lahan pertaniannya. Meski pernah terjadi namun sangat jarang lahan dijual untuk kebutuhan ekonomi seperti biaya pendidikan anak ataupun modal usahatani. Untuk kebutuhan ekonomi biasanya petani lebih memilih meminjam uang di kerabatnya, tengkulak dan rentenir. Masyarakat lebih memilih menabung untuk modal usahatani dan membiarkan lahannya kosong hingga modal dapat dikumpulkan. Berbeda jika petani memerlukan uang tunai untuk keperluan prestise, lebih mudah bagi petani melepas lahan dibanding meminjam ke kerabat atau rentenir.

Untuk pemerintah desa, kondisi beralihnya 90% lahan pertanian rakyat ke perusahaan-perusahaan sangat mengkhawatirkan. Dengan pesatnya pembangunan di Desa Kuripan, diperkirakan dalam beberapa tahun ke depan lahan-lahan tersebut semuanya sudah akan digunakan oleh perusahaan. Jika petani tidak lagi dapat bercocok tanam di bekas lahan miliknya maka akan banyak warga yang kehilangan sumber nafkah dan menjadi masalah sosial di desa. Beralihnya lahan milik petani ke perusahaan untuk kondisi sekarang belum terasa dampaknya sebab petani masih menggunakan lahan tersebut untuk memperoleh penghasilan. Namun apa yang terjadi pada lima atau sepuluh tahun ke depan? Bagaimana nasib para petani yang selama ini bertahan hidup dari lahan pertanian yang digarapnya. Menjadi sebuah pemikiran bagi penulis, bahwa para petani ini nantinya akan menjadi kelompok orang miskin baru, dimana dulunya adalah orang-orang dengan kelas sosial ekonomi yang bukan tergolong miskin. Kelompok inilah nantinya akan menjadi penyebab perubahan sosial di desa Kuripan terutama dalam struktur sosial masyarakat akibat makin luasnya kapitalisme menguasai aset-aset desa oleh berkembangnya desa Kuripan sebagai desa rurban. Kondisi ini sesuai dengan pendapat Hayami dan Kikuchi (1987) yang menyatakan bahwa

gelombang modernisasi dalam banyak hal telah menyebabkan terjadinya sejumlah perubahan penting pada masyarakat pedesaan. Isolasi geografis, ekonomi, politik, sosial, budaya dan psikologis secara pasti hilang sedikit demi sedikit, dan hasilnya komunitas desa yang semula lembut, personal, harmonis, kolektif dan humanistik pelan-pelan berubah menjadi komunitas yang individualistik, serba kontraktual, terpolarisasi dan sekaligus makin kritis.

Pesatnya alih kepemilikan lahan ini juga menimbulkan konflik dimana terdapat orang-orang yang tidak bertanggungjawab melakukan penjualan tanah yang tidak jelas. Tanah desa yang dikelola warga, ikut di jual oknum warga. Surat jual beli yang tidak sah saat ini menjadi masalah desa. Pemerintah dituntut oleh sekelompok pengembang property untuk menggantikan lahan-lahan yang dijual oknum warga dimana alas hak dari lahan tersebut adalah milik desa. Tentu saja pihak pemerintah desa menolak karena konsekuensi hukum yang mungkin akan ditanggung aparat desa yang tengah menjabat.

Selain konflik lahan, sejak tahun 2019, terdapat 60 Ha lahan pertanian di Desa Kuripan yang telah diambil alih oleh PT Batik Keris berada dalam penyitaan Kejaksaan Republik Indonesia. Hal ini disebabkan lahan-lahan tersebut adalah aset

milik PT BK yang pemiliknya sedang terseret kasus korupsi yang merugikan negara. Dengan demikian, usahatani yang dilakukan petani di Desa Kuripan pada lahan-lahan tersebut dapat dihentikan sewaktu-waktu. Dan jika ini terjadi maka masalah yang dihadapi pemerintah desa akan lebih cepat terjadi dari perkiraan sebelumnya.

BAB III

PETANI SINGKONG DAN TENGGULAK

Sejak sebelum usahatani padi sawah hilang dari Desa Kuripan, petani telah menanam tanaman singkong pada lahan-lahan tegalan yang ada. Dahulunya, pertanian padi sawah mengandalkan air dari kali Susukan Wetan namun karena debit air berkurang, aliran air tidak lagi mampu menjangkau Desa Kuripan. Sejak tahun 2000 aliran air terhenti di desa Cibentang dan sejak itu pertanian padi sawah tidak lagi dilakukan oleh petani. Disaat yang sama pabrik-pabrik mulai beroperasi di daerah Tangerang Selatan dan Parung sehingga petani-petani terutama yang muda beralih sebagai pekerja pabrik. Mereka yang bertahan bekerja sebagai petani kebanyakan petani-petani tua yang memang cara hidup yang dikenalnya hanya bercocok tanam.

Fenomena petani tua yang tetap bertahan di sektor pertanian merupakan etika subsistensi yang berlangsung sejak lama. Bagi mereka, cukuplah hidup untuk memenuhi kebutuhan dasar saja, dapat makan dan menghasilkan produksi dari tanahnya untuk keperluan sehari-hari sudah memuaskan

petani. Sekalipun pengaruh kota telah masuk ke kehidupan Desa, petani tua ini tetap hidup bersahaja dari bercocok tanam. Mereka enggan mencoba hal-hal baru seperti bekerja di sektor lain seperti yang dilakukan oleh kaum muda karena enggan terhadap resiko. Penny (1978) menjelaskan bahwa petani-petani *subsistence-minded* memandang kesempatan-kesempatan baru yang baik dengan cara dan ukuran yang berlainan dari yang dilakukan oleh orang-orang luar.

Dengan luas desa 548,848 Ha terdapat sekitar 67% yang berpotensi menjadi lahan untuk pertanian baik tanah sawah maupun tanah perkebunan. Peruntukan lahan-lahan lainnya terdiri dari perumahan, pekarangan (lahan kosong), perkantoran, hutan bambu dan hutan kayu.

Sejak hilangnya sawah, tanaman utama yang diusahakan adalah jenis umbi-umbian, baik ubi jalar maupun tanaman singkong. Selain itu terdapat beberapa jenis usahatani yang dijalankan petani seperti kentang mini (*baby potato*), jagung, timun suri, kacang tanah. Beberapa ada yang mengusahakan tanaman hias, memelihara ikan hias, budidaya ikan lele, beternak ayam dan kambing. Meski demikian usahatani tersebut sebagian besar dilakukan secara monokultur dan diusahakan dalam skala kecil.

Usahatani yang paling terlihat di Desa Kuripan adalah singkong, tanaman ini menjadi tanaman yang terbanyak diusahakan baik untuk memanen umbi singkong maupun daun singkong (oleh masyarakat disebut oyek). Singkong (ubi kayu) merupakan tanaman tropis. Untuk dapat tumbuh, berkembang dan berproduksi dengan baik, tanaman singkong menghendaki persyaratan tertentu. Suhu tumbuh yang diperlukan adalah 18°C - 35°C. Desa Kuripan berada pada kisaran suhu tersebut. Menurut Suharno et. al. (1999) diluar kisaran suhu 18°C - 35°C pertumbuhan akan terhambat. Kelembaban udara yang dibutuhkan singkong adalah 65% sedangkan pH minimal yang diperlukan adalah 5. Jenis tanah di desa Kuripan berwarna merah kekuningan dan termasuk tanah latosol dan Sebagian oxisol. Tanah oxisol kaya akan zat besi dan aluminium oksida. Sehingga memerlukan tambahan hara melalui pemupukan agar singkong dapat berproduksi dengan baik. Apalagi tanaman singkong adalah tanaman yang mampu berproduksi tinggi, tetapi juga cepat menguruskan tanah.

Tanaman singkong dapat ditanam secara monokultur maupun tumpangsari. Di desa Kuripan kebanyakan singkong ditanam secara monokultur. Menurut Sundari (2010), pola monokultur umumnya dikembangkan dalam usaha tani komersial atau usahatani alternatif pada lahan marjinal, di

mana komoditas lain tidak produktif atau usahatani dengan input minimal bagi petani yang modalnya terbatas. Di Desa Kuripan, tanaman singkong terutama yang hasilnya adalah oyek ditanam secara monokultur untuk tujuan komersil. Modal petani yang terbatas membuat banyak petani tidak melakukan tumpangsari. Menanam singkong untuk menghasilkan oyek menjadi pilihan karena hanya sebulan sudah dapat dipanen, petani memperoleh pendapatan bulanan. Sedangkan menanam singkong untuk menghasilkan umbi memerlukan waktu berbulan-bulan untuk panen dan memperoleh uang, sulit memenuhi kebutuhan hidup jika hanya berharap dari hasil panen umbi singkong. Biasanya petani umbi akan mencari pekerjaan lain seperti menjadi buruh pasir (pengangkat pasir) di Desa Kuripan atau buruh bangunan di sekitar desa.

Dalam kehidupannya, petani singkong bergantung kepada tengkulak terutama dalam permodalan dan memasarkan hasil produksinya. Hubungan yang terbina adalah hubungan patron klien berupa hubungan timbal balik antara dua orang yang dijalin secara khusus atas dasar saling memberi dan menerima dan menghasilkan keuntungan dari kedua pihak.

Beberapa hubungan patron klien didasarkan atas ketidaksetaraan ekonomi (Priyatna & Sumartono, 2011, Fausayana et al, 2018, Scott 1976). Dalam penentuan harga

petani berada pada posisi tawar yang rendah sedangkan tengkulak sebagai patronnya adalah penentu harga. Lemahnya posisi petani dalam menentukan harga karena ketergantungan yang tinggi dengan patron. Sebagian besar usahatani singkong yang dijalankan petani Desa Kuripan meminjam uang dari tengkulak untuk membiayai usahatannya. Jumlah modal yang diberikan tengkulak yaitu Rp2.000.000 per petani. dan dibayar pada saat panen.

Harga umbi singkong pada saat panen (yang biasanya serentak di desa Kuripan) membuat persediaan singkong banyak sehingga berlakulah hukum ekonomi dimana harga akan jatuh ketika persediaan produk lebih besar dari permintaan pasar. Untuk mengatasi ini diperlukan pengolahan pasca panen dari umbi singkong agar tahan lama. Melalui binaan yang dilakukan Universitas Muhammadiyah Jakarta, telah dilakukan transfer ketrampilan pengolahan kripik singkong kepada masyarakat dan membentuk UKM desa, namun masih memerlukan waktu untuk mengoptimalkan produksi dan menguatkan UKM yang ada.

Keterikatan dengan patron memang bukan hal baru bagi petani. Hal ini terlihat pada hubungan tengkulak (tauke) dengan petani karet (Syafriatin, et al, 2013). Hasil yang sama terdapat dalam penelitian Fausayana et al (2018) dimana petani

rumpun laut di Desa Bungin Permai yang mengalami keterbatasan modal terikat pinjaman ke pedagang (tengkulak) untuk memulai kegiatan budidaya rumput laut. Akibatnya petani juga harus menjual hasil panen kepada pedagang tersebut dengan harga lebih rendah dari harga rumput laut pada umumnya.

Tengkulak yang dikenal di Desa Kuripan adalah para pedagang dan pengepul hasil-hasil pertanian yang diproduksi di desa. Keberadaan tengkulak memegang peranan penting terutama bagi petani. Tengkulak menyediakan modal usahatani, sarana produksi yang diperlukan petani hingga membeli dan memasarkan hasil-hasil pertanian.

Tengkulak membeli umbi singkong dan oyek langsung ke petani. Umbi dijual petani hanya sekali pada saat panen, biasanya langsung diborong oleh tengkulak. Banyaknya hasil panen menyebabkan harga umbi singkong jatuh. Menurut Ginting (2002), melimpahnya hasil panen ubikayu pada waktu panen raya menyebabkan harga jual ubikayu merosot sehingga seringkali merugikan petani produsen. Disamping itu, singkatnya daya simpan ubikayu segar menyebabkan petani tidak dapat menunda lebih lama untuk tidak menjual hasil panennya meski dengan harga yang relatif rendah.

Petani di Desa Kuripan melakukan panen sekaligus,

walaupun mereka bisa saja melakukan panen secara bertahap, namun penundaan panen akan mengakibatkan turunnya kualitas umbi. Berbeda dengan daun singkong (oyek) yang ditanam sebulan dan langsung di panen. Banyaknya produksi oyek di Desa Kuripan memungkinkan setiap hari petani panen bergantian. Waktu tumbuh yang singkat memungkinkan petani mengatur waktu menanamnya sehingga dapat panen secara kontinyu. Sebagai pusat produksi oyek, setiap hari oyek diangkut oleh tengkulak untuk dipasarkan ke luar Desa sebanyak 3 (tiga) unit mobil kecil dengan bak terbuka. Baik umbi singkong maupun oyek yang dikumpulkan tengkulak dijual ke pasar induk Kramat Jati, dari sanalah baru akan di distribusi ke pasar-pasar lainnya. Selain itu sebagian dijual juga ke pasar Tangerang meski dalam jumlah yang lebih sedikit.

Rendahnya pendapatan petani singkong dan petani oyek tentunya tidak mencukupi kebutuhan hidup rumah tangga tani. Diperlukan intervensi dari berbagai stakeholder terkait untuk meningkatkan pendapatan petani. Dalam lingkungan hidupnya petani akan memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya, yang oleh petani di Desa Kuripan dapat melalui intensifikasi penggunaan lahan. Dengan kondisi lahan yang sudah banyak beralih fungsi dan beralih kepemilikan, maka lahan desa yang

ada sangat terbatas, tidak memungkinkan untuk dilakukan ekstensifikasi pertanian.

BAB IV

BANK EMOK

Bank Emok adalah istilah yang diberikan warga kepada sekelompok orang yang menjalankan usaha peminjaman uang kepada masyarakat dengan cepat khususnya kepada ibu-ibu di Desa Kuripan dan desa sekitarnya. Istilah Emok diadopsi dari cara usaha ini dijalankan, yaitu hanya melibatkan perempuan saja, mulai dari *debt collector* hingga nasabahnya adalah perempuan. Ketika terjadi kesepakatan ataupun transaksi, para perempuan yang terlibat akan duduk *meriyung*¹ bersama di tempat yang disepakati, biasanya di rumah nasabah atau calon peminjam uang. Bukan berarti para lelaki tidak bisa meminjam di Bank Emok, namun prosesnya dilakukan oleh istri dengan sepengetahuan suaminya.

Bank Emok bukanlah Bank yang sesungguhnya, melainkan sebuah praktik rente yang beroperasi mengambil keuntungan dari masyarakat desa seolah-olah “peri penyelamat”. Pemilik modal Bank Emok hingga kini tidak diketahui secara jelas, para pekerjanya yang merupakan kolektor adalah perempuan local (warga desa/ tetangga desa)

¹ Meriyung diartikan sebagai duduk bersimpuh dengan kaki menyilang ke belakang

yang tidak mengenal pemilik modal, bahkan tidak pernah bertemu sekalipun. Mereka hanya berhubungan dengan orang kepercayaan pemilik modal (kaki tangan) yang sangat setia menyimpan rapat identitas bosnya. Bank Emok memang melibatkan perempuan dari warga lokal sebagai pekerja (kolektor) untuk menemukan ibu-ibu yang membutuhkan pinjaman uang. Para perempuan yang menjadi pencari nasabah ini mendapat upah/ bayaran dari transaksi yang terjadi.

Jumlah uang yang dipinjamkan oleh Bank Emok bervariasi, mulai dari ratusan ribu hingga puluhan juta rupiah. Syarat yang diberikan kepada calon nasabah adalah memiliki usaha yang hasilnya mampu membayar cicilan pinjaman di Bank Emok. Dalam meminjam ada tandatangan suami sebagai bukti prosesnya diketahui oleh suami nasabah. Namun dalam perjalanannya, syarat tersebut kian kabur dan sering tidak diindahkan oleh nasabah maupun kolektor yang bekerja pada Bank Emok. Para kolektor ini membutuhkan nasabah, tanpa nasabah mereka tidak akan memperoleh gaji, akibatnya seringkali kolektor-kolektor Bank Emok menutup mata terhadap persyaratan yang ada. Bagi mereka yang utama adalah mendapat nasabah dengan pembayaran yang lancar. Sedangkan bagi sebagian ibu-ibu yang terpenting adalah dapat memperoleh uang tunai dalam jumlah besar secara cepat

dengan mudah melalui Bank Emok. Karena tidak berbasis usaha maka pinjaman ke Bank Emok lebih banyak digunakan untuk keperluan konsumtif oleh ibu-ibu di Desa Kuripan. Keadaan makin parah apabila dalam prosesnya ibu-ibu tersebut meminjam tanpa sepengetahuan suaminya.

Sebuah kisah nyata yang menarik adalah Ibu Elis (bukan nama sebenarnya), meminjam uang di Bank Emok untuk keperluan konsumtif. Setelah mencicil beberapa bulan, ia tidak mampu membayar hutangnya dan akhirnya meminjam lagi di Bank Emok melalui kolektor lain. Uang tersebut digunakan untuk menutupi hutangnya di kolektor pertama. Dengan demikian ibu Elis yang mampu melunasi hutangnya dianggap nasabah yang baik sehingga kolektor pertama meminjamkan lagi uang dalam jumlah yang jauh lebih besar kepada Bu Elis. Akibatnya Bu Elis berhutang di Bank Emok pada dua kolektor. Mulailah Bu Elis menemukan masalah sebab tanpa usaha ia tidak memiliki pendapatan untuk membayar hutang tersebut, sementara uang yang dipinjam telah habis untuk keperluan konsumtif. Pada akhirnya, bu Elis dari waktu ke waktu hanya membayar denda saja di kedua kolektor dan sepanjang masa terikat hutang yang tidak kunjung lunas.

Meski tidak memiliki legalitas, operasi yang dilakukan Bank Emok terus berjalan sejak tahun 2015. Pada awalnya,

pemerintah membiarkan adanya Bank Emok. Namun Ketika seorang warga Desa Kuripan yang tinggal di RW 1 harus kehilangan rumahnya sekitar tahun 2019 karena terlilit hutang di Bank Emok, maka pemerintah Desa mulai melarang operasinya. Sejak itu, operasi Bank Emok dilakukan secara sembunyi-sembunyi menghindari aparat desa. Uniknya, meski dilarang beroperasi oleh pemerintah, ibu-ibu yang selama ini menjadi ‘langganan’ Bank Emok justru memprotes larangan pemerintah desa tersebut. Bagi mereka, Bank Emok tetaplah satu-satunya penyelamat dikala mereka kesulitan memperoleh pinjaman uang dalam waktu singkat dan mudah.

Dalam mengambil keputusan yang berhubungan dengan pengaturan keuangan, seharusnya ibu-ibu nasabah Bank Emok bertindak rasional secara ekonomi. Uang dipinjam untuk investasi yang menguntungkan secara ekonomi. Namun kenyataannya, dorongan nafsu untuk memiliki uang tunai dalam jumlah besar dan berbelanja barang-barang yang selama ini tidak pernah dimiliki mengaburkan pemikiran rasional tersebut. Ibu-ibu yang terlilit hutang sadar bahwa tindakannya salah namun mereka terbawa kehidupan materialistik yang dihadirkan oleh lancarnya arus informasi dari TV terutama siaran sinetron dan media sosial yang hadir di desa rural urban.

BAB V

DAMPAK PANDEMI COVID-19

Kehidupan sosial masyarakat di Desa Kuripan mengalami guncangan ketika pandemic covid-19 melanda secara global. Masyarakat Desa Kuripan sebagian besar menggantungkan ekonomi rumah tangga dari uang yang berasal dari luar desa melalui transfer dari anggota keluarga yang bekerja di luar desa. Uang tersebut memutar roda ekonomi desa karena dibelanjakan di desa untuk keperluan hidup. Sebagian lagi menetap di desa namun bekerja di sekitar desa dan mendapatkan hasil upah sebagai buruh dan karyawan yang pendapatannya juga menyumbang belanja masyarakat di desa dan menggerakkan pembangunan. Ketika terjadi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) oleh pandemic Covid-19 maka ekonomi desa menjadi ikut terpengaruh. Masyarakat kehilangan sumber nafkahnya karena pabrik-pabrik, rumah makan, toko-toko serta sektor lain seperti pembangunan perumahan yang menyerap tenaga kerja desa sebagai buruh bangunan ikut berhenti. Kondisi pandemic memaksa masyarakat untuk *survive* dengan mencari sumber

nafkah lain. Mereka yang ada di kota terpaksa pulang ke desa karena tidak dapat bertahan hidup di kota tanpa upah.

Saputra, et al (2019) menjelaskan strategi nafkah petani oleh adanya konversi lahan di Desa Padangguni Utama yang merujuk pada teori Scoones (1998). Penerapan strategi nafkah pada rumah tangga petani dilakukan dengan cara memanfaatkan berbagai sumber daya yang dimiliki dalam upaya untuk dapat bertahan hidup. Scoones membagi tiga klasifikasi strategi nafkah (*livelihood strategy*) yang mungkin dilakukan oleh rumah tangga tani, yaitu: rekayasa sumber nafkah pertanian, yang dilakukan dengan memanfaatkan sektor pertanian secara efektif dan efisien baik melalui penambahan input eksternal seperti teknologi dan tenaga kerja (intensifikasi), maupun dengan memperluas lahan garapan (ekstensifikasi), pola nafkah ganda, yang dilakukan dengan menerapkan keanekaragaman pola nafkah dengan cara mencari pekerjaan lain untuk menambah pendapatan, atau dengan mengerahkan tenaga kerja keluarga (ayah, ibu, dan anak) untuk ikut bekerja dan memperoleh pendapatan (diversifikasi nafkah) dan rekayasa spasial merupakan usaha yang dilakukan dengan cara mobilisasi/ perpindahan penduduk baik secara permanen maupun sirkular (migrasi) dalam rangka mencari sumber nafkah (*livelihood sources*) di tempat lain.

Di Desa Kuripan, sektor pertanian yang sudah ditinggalkan masyarakat akhirnya menjadi sumber penopang utama mereka yang kembali ke desa. Sebagian yang memiliki tabungan hidup dari simpanannya namun yang tidak punya tabungan kembali bercocok tanam. Dengan segala keterbatasan sumber daya lahan yang ada di desa dan berkurangnya debit air, diperlukan usaha untuk menghidupkan kembali pertanian, terutama pertanian padi sawah yang dapat meningkatkan ketahanan pangan dalam rumah tangga dan desa pada umumnya. Meski negara Indonesia merupakan negara agraris namun sangat ironis hingga kini Indonesia masih tergantung pada impor bahan pangan. Jika dibiarkan berlanjut maka negara ini akan menghadapi krisis sosial karena kekurangan pangan. Penduduk Indonesia berada pada urutan ke-4 di dunia setelah China, India dan Amerika. Dengan 267 juta penduduk yang perlu diberi makan maka kekurangan bahan pangan akan menyebabkan krisis sosial.

Untuk menghindari terjadinya krisis sosial, perlu upaya penataan lahan pertanian untuk mewujudkan kedaulatan dalam produksi pangan. Artinya, pemerintah harus menata lahan pertanian di Indonesia sehingga dapat menghasilkan kebutuhan pangan secara mandiri dan berkelanjutan. Dengan menegakkan kedaulatan pangan, diharapkan Indonesia tidak terpengaruh

oleh krisis ekonomi global. Sebaliknya, Indonesia diharapkan dapat meningkatkan cadangan pangan di pasar global. Untuk menegakkan kedaulatan pangan yang mandiri, dibutuhkan manajemen dan teknologi pertanian yang andal disertai dengan usaha-usaha memberdayakan petani dan kelembagaan petani (Yusdja & Soeparno, 2011).

Kelembagaan petani di pedesaan berkontribusi dalam akselerasi pengembangan sosial ekonomi petani; aksesibilitas pada informasi pertanian; aksesibilitas pada modal, infrastruktur, dan pasar; dan adopsi inovasi-inovasi pertanian. Disamping itu, keberadaan kelembagaan petani akan memudahkan bagi pemerintah dan pemangku kepentingan yang lain dalam memfasilitasi dan memberikan penguatan pada petani. Di Desa Kuripan, kelembagaan petani yang paling berperan adalah adalah Kelompok tani dan tengkulak. Kelompok tani sesungguhnya belum berfungsi sebagaimana tujuan pembentukannya. Masih memerlukan penguatan dan pendampingan untuk memberdayakan petani di Desa Kuripan yang 90 persen adalah petani gurem (tanpa lahan). Kelompok tani yang ada masih sebatas sebuah perkumpulan petani yang dibentuk agar program-program pembangunan pertanian yang dijalankan pemerintah dapat menjangkau petani kecil tanpa lahan yang termarginalisasi secara ekonomi oleh hadirnya

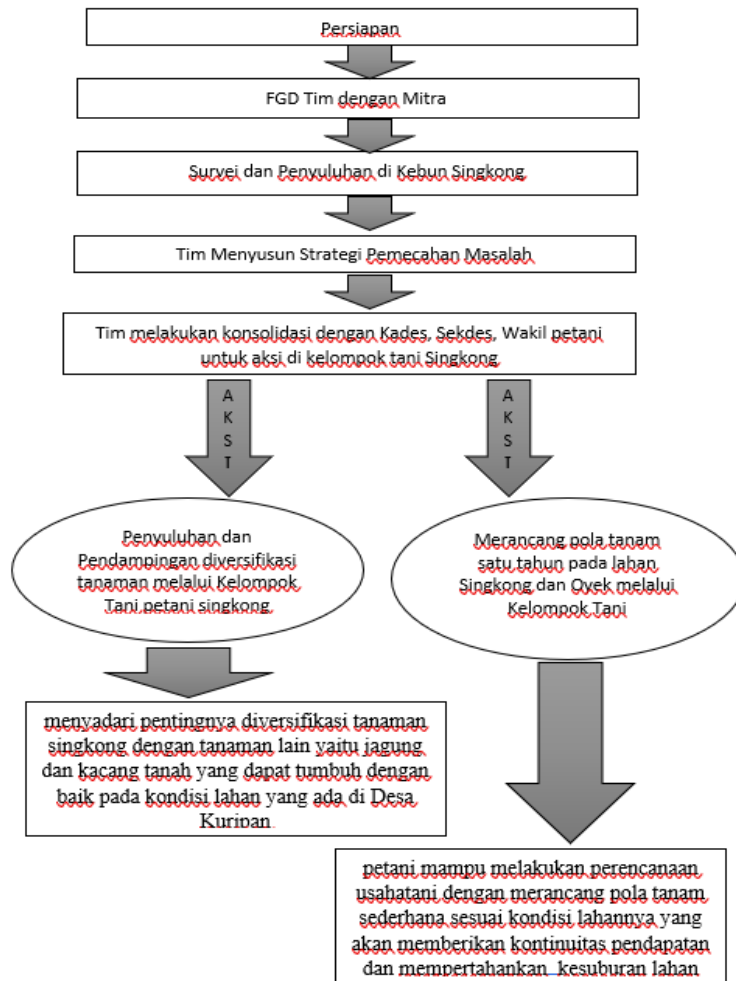
kapitalisme dan secara sosial oleh masuknya penduduk kota bermukim sebagai warga baru di perumahan-perumahan yang terbangun di Desa Kuripan. Hal ini sejalan dengan Anantanyu (2011) yang menunjukkan bahwa program-program pembangunan semakin sulit untuk menjangkau petani kecil secara individu yang jumlahnya sangat banyak. Situasi ekonomi yang ada, infrastruktur, serta kebijakan yang diciptakan oleh pemerintah seringkali mendorong petani-petani dengan lahan sempit dan buruh tani terdesak ke arah marginalisasi secara ekonomi dan sosial. Selain penguasaan atas lahan pertanian yang sempit, nilai tukar pertanian yang rendah, kebijakan pertanian yang tidak berpihak ke petani semakin mendorong terpuruknya petani ke dalam kemiskinan.

Ditengah pandemic covid-19, pemerintah Desa Kuripan mendorong penguatan kelembagaan pertanian khususnya kelompok tani agar dapat memiliki kekuatan dan posisi tawar yang kuat dalam kegiatan pertanian. Usahatani yang dijalankan Sebagian besar adalah tanaman singkong dan dalam kesehariannya petani bergantung pada tengkulak sebagai lembaga pemasaran yang juga pemberi modal usahatani kepada sebagian petani singkong. Pemerintah Desa yang dipimpin oleh Siti Aswat Narulita menggalang kerjasama dengan *stakeholder* terkait khususnya Universitas dan penyuluh pertanian untuk

berkolaborasi dalam pemberdayaan masyarakat tani. Dalam program Pengabdian Masyarakat yang dilakukan Universitas Muhammadiyah Jakarta pada tahun 2021, beberapa penguatan dilakukan seperti penguatan UMKM, pendampingan Bumdes, dan pendampingan sengketa lahan. Sedangkan di sektor pertanian penguatan kelembagaan dilakukan melalui penyuluhan dan pendampingan kepada kelompok tani.

Program yang dijalankan oleh tim Pengabdian Masyarakat di Desa Kuripan dalam menguatkan kelembagaan kelompok tani dapat dilihat pada bagan kegiatan berikut.

Bagan 1. Kegiatan Tim Pengmas UMJ di Desa Kuripan untuk mengoptimalkan potensi pertanian melalui Kelompok Tani 2021



Petani melalui kelompoknya diberi edukasi untuk melakukan optimalisasi penggunaan lahan dengan diversifikasi tanaman, bukan hanya tanaman singkong. Sebagaimana diuraikan di bab sebelumnya, tanaman singkong belum mampu meningkatkan pendapatan rumah tangga petani, apalagi di tengah krisis hilangnya sumber nafkah lain dalam rumah tangga tani akibat pandemic covid-19.

Berdasarkan potensi pertanian setempat, tanah di Desa Kuripan tergolong tanah latosol dan Sebagian oxisol. Tanah latosol merupakan tanah yang mengalami pelapukan lanjut dengan karakteristik pH masam, kandungan bahan organik dan hara rendah. Tanah latosol merupakan tanah marginal dengan tingkat kesuburan rendah. Tanah ini sering dimanfaatkan untuk budidaya tanaman semusim misalnya kedelai, kacang hijau, jagung, kacang tanah dan ketela rambat (Saptiningsih & Haryanti, 2015) Sedangkan tanah Tanah Oxisol adalah tanah dengan pelapukan lanjut dan mempunyai batas-batas horizon oksik, fraksi liat yang sangat tinggi, kapasitas tukar kation rendah, dan mempunyai batasan-batasan horizon yang tidak jelas. Pada Horizon permukaan bawah sangat banyak mengandung oksida besi dan aluminium. Sebagian besar di daerah tropis mengandung oksida besi dan aluminium sehingga tanah kurang subur tetapi dengan pemupukan dan pengolahan

tanah yang tepat dapat menjadi tanah yang produktif (Haryanto, 2013). Berdasarkan jenis tanah latosol maupun oxisol di Desa Kuripan maka pengusahaan tanaman singkong memang sesuai dengan kondisi lahan yang ada. Untuk melakukan diversifikasi tanaman hanya ada beberapa jenis tanaman yang cocok yaitu tanaman jagung dan kacang-kacangan. Kedua jenis tanaman ini yang menjadi alternatif untuk mengoptimalkan penggunaan lahan pertanian yang ada.

Untuk meningkatkan produksi pangan khususnya beras yang menjadi makanan pokok utama maka pertanian padi sawah di Desa Kuripan memiliki peluang untuk dihidupkan kembali jika tersedia sarana irigasi. Irigasi yang dapat dibuat adalah embung². Pembuatan embung tentunya hanya dapat diwujudkan dengan melibatkan *stakeholder* terkait terutama pemerintah desa, pemerintah Kabupaten dan masyarakat. Selanjutnya dalam pengelolaannya dapat dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Pemerintah desa dapat melibatkan masyarakat pada pengelolaan irigasi partisipatif melalui kelompok tani atau

² Embung adalah kolam besar (danau buatan) yang dibuat untuk menampung air baik yang berasal dari hujan, limpasan permukaan maupun mata air. Embung dapat berfungsi sebagai sumber air bagi kegiatan pertanian, juga dapat menjadi cadangan air di musim kemarau dan mengendalikan genangan air yang sering terjadi di musim hujan.

kelompok pengelola air. Dengan melibatkan masyarakat petani diharapkan dapat tercipta peran masyarakat yang menjaga jaringan irigasi dengan baik serta meningkatkan pelayanan dan penyediaan air bagi pertanian. Dengan demikian usahatani padi sawah dapat dilaksanakan dengan tercukupinya kebutuhan akan air, jika hal ini terwujud dengan baik maka akan menjamin peningkatan hasil pertanian khususnya padi sawah yang selama bertahun-tahun belakangan tidak lagi dapat dilakukan di Desa Kuripan.

Bukan hal baru bahwa sektor pertanian adalah sektor paling Tangguh yang dimiliki Indonesia di setiap krisis yang dialami negara ini. Sejak tahun 1998 ketika krisis moneter melanda, produk pertanian justru mendatangkan berkah bagi banyak petani. Harga cengkeh, coklat dan komoditas ekspor lainnya telah menghasilkan devisa bagi negara dan menyelamatkan ekonomi bangsa. Saat ini ditengah krisis global oleh pandemic covid-19, sector pertanian lagi-lagi menjadi sector andalan dengan pertumbuhan yang selalu positif ketika sector-sektor lainnya jatuh terpuruk. Karenanya sudah sewajarnya jika pemerintah lebih memperhatikan pembangunan pertanian di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Anantanyu, S. 2011. Kelembagaan Petani: Peran Dan Strategi Pengembangan Kapasitasnya - SEPA: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian dan Agribisnis. Vol. 7 (2). pp: 102 – 109
- Anonimous. 2014. Penataan Ruang dan Perlindungan Lahan Pertanian. Bappeda.grobogan.go.id. 11 Desember (diakses 29 Desember 2021)
- Azzam, M. 2020. Ini Daftar 55 Perumahan di Kota Bekasi Terendam Banjir, Ketinggian Hingga Mencapai 2 Meter. <https://wartakota.tribunnews.com/>(diakses 30 Desember 2021)
- Bachriadi, D & Wiradi, G 2011, Enam Dekade Ketimpangan Masalah Penguasaan Tanah di Indonesia, Agrarian Resource Center, Bina Desa, Konsorsium Pembaharuan Agraria, Bandung.
- Chambers, Robert, Pembangunan Desa, Mulai Dari Belakang, (Jakarta: LP3ES, 1987).
- Fausayana, I., Meisanti, Badriadi, La Nalefo, Akhyar. 2018. Relationship Pattern of the Patron-Client Seaweed Farming of Bajo Community. Unified Journal of Economics and International Finance Vol 3(1): 001-007 <http://www.unifiedjournals.org/ujeif>
- Gamst, C.F. Peasants in Complex Society, USA, Holt, Rinehart and Winston, Inc. 1974.

- Haryanto, Y., 2013. Kamus Pertanian Umum. Swadaya, Jakarta.
- Hayami, Yijiro dan Masao Kikuchi, Dilema Ekonomi Desa, Suatu Pendekatan Ekonomi terhadap Perubahan Kelembagaan di Asia, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1987).
- Kompas. 2021. Urbanisasi di Perdesaan, Fenomena Desa-desa Menjadi Desa Perkotaan. Luh Kitty Katherina: <https://regional.kompas.com/read/2021/06/15/171018278/urbanisasi-diperdesaan-fenomena-desa-desa-menjadi--desa-perkotaan?page=all>.
- Kompas. 2015. Enam Indikator "Peri-urban" yang Harus Anda Ketahui. Penulis Arimbi Ramadhiani: <https://properti.kompas.com/read/2015/09/15/100000821/Enam.Indikator.Peri-urban.yang.Harus.Anda.Ketahui?page=all>.
- Nasikun. 2010. Sistem Sosial Indonesia. PT Raja Grafindo Persada.
- Penny, D.H. 1978. Masalah Pembangunan Pertanian Indonesia. Gramedia.
- Priyatna, F & Sumartono, S. 2011. Pola Pemanfaatan Sumber Daya, Subsistensi dan Pola Hubungan Patron Klien Masyarakat Nelayan di Danau Tempe Sulawesi Tengah. Jurnal Matematika, Sains dan Teknologi. Vol 12 (1): 37-45.

- Redfield, R. 1985. Masyarakat Petani dan Kebudayaan. Jakarta: CV. Rajawali.
- Saptiningsih, E., Haryanti, S. 2015. Kandungan Selulosa Dan Lignin Berbagai Sumber Bahan Organik Setelah Dekomposisi Pada Tanah Latosol. Buletin Anatomi dan Fisiologi Vol 23(2): 34-42
- Saputra, I.N., Rahmah, N., Meisanti. 2019. Strategi Nafkah Petani oleh Adanya Konversi Lahan Sawah Ke Lahan Kelapa Sawit (Studi Kasus Desa Padangguni Utama Kecamatan Abuki Kabupaten Konawe). Jurnal Ilmiah Membangun Desa dan Pertanian. Vol 4(2):35-40
- Scott, J. C. 1976. The Moral Economy of The Peasant: Rebellion and Subsistence in Southeast Asia. Newhaven: Yale University.
- Sundari, T. 2010. PETUNJUK TEKNIS Pengenalan Varietas Unggul dan Teknik Budidaya Ubi kayu (Materi Pelatihan Agribisnis bagi KMPH). Balai Penelitian Kacang Kacangan dan Umbi Umbian, Malang
- Syafriyatin, Yusmini, and Shorea Khaswari 2013. Pola Hubungan Antara Petani Karet Dengan Toke (Patron-Client) Di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar. Fakultas Pertanian, Universitas Riau
- Suharno, Djasmin, Rubiyo, Dasiran. 1999. Budi Daya Ubi Kayu. Badan Peneliti dan Pengembangan Pertanian. Kendari

Wiradi, G 2009, Seluk beluk masalah agraria reforma agraria dan penelitian agraria, STPN Press, Yogyakarta

Yusdja, Y. & Soeparno, H. 2011. Dampak Krisis Ekonomi Terhadap Pertanian di Indonesia. <https://www.litbang.pertanian.go.id/buku/konversi-fragmentasi-lahan> (diakses 30 Desember 2021)

BIODATA PENULIS

NAMA	Kompetensi	Link Google Scholars
Dr. Meisanti, SP.,MP	Agribisnis/ ekonomi pertanian	https://scholar.google.co.id/citations?user=RkldvyIAAAAJ&hl=id
Dr. Lusi Andriyani., M.Si	Pemberdayaan Masyarakat Perkotaan dan Desa dan Pengelolaan kelembagaan	https://scholar.google.com/citations?user=HrG_gYUAAAAJ
Ir. Sularno.,MSi	Agronomi	https://scholar.google.co.id/citations?user=Y8mzV5YAAAAJ&hl=id
Dr.Oktaviana Purnamasari.,M.Si	Komunikasi pemasaran digital	https://scholar.google.com/citations?user=TZd81q8AAAAJ&hl=en
Dr. Izzatusolekha, M.Si	Kebijakan Publik dan pemberdayaan masyarakat	https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=en&user=DmgsAAAJ
Dr. Hasanah, SE.,MM	Manajemen SDM	https://scholar.google.co.id/citations?user=1Qozy-cAAAAJ&hl=id
Jamiati KN, M.Ikom	Komunikasi pemasaran digital	https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=SneDf9cAAAAJ
Tria Patrianti, S.Sos.,M.IKom	Humas dan membangun jejaring dengan stokeholder	https://scholar.google.co.id/citations?user=Za47CyYAAAAJ&hl=en
Lilik Sumarni., S.Sos.,M.Si	Pemberdayaan Masyarakat, kewirausahaan	https://scholar.google.co.id/citations?user=RO7yU5YAAAAJ&hl=en



**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA



**BANTUAN PENDANAAN PROGRAM PENELITIAN KEBIJAKAN MERDEKA
BELAJAR KAMPUS MERDEKA DAN PENGABDIAN MASYARAKAT BERBASIS
HASI PENELITIAN DAN PURWARUPA PTS**

**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
TAHUN 2021**

Penerbit :



ISBN 978-623-5523-46-0



9 786235 523460